



**PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN 2024**

Jalan : Untung Surapati No. 2 Telp. (0366) 24459

**PENGUMUMAN**

NOMOR 810/05/PANSEL.PNS/CLK/2024

TENTANG

**SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Keputusan Bupati Klungkung Nomor 276/22/HK/2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Khusus dan Kebutuhan Umum pada Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024, Tanggal 13 Agustus 2024, Hal: Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024. Dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klungkung membuka kesempatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. FORMASI JABATAN**

Jumlah alokasi formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 203 formasi, dengan rincian:

1. Tenaga Kesehatan : 109 (Seratus Sembilan)
2. Tenaga Teknis : 94 (Sembilan Puluh Empat)

Dengan rincian formasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Pengumuman ini.

**II. PERSYARATAN**

**A. Persyaratan Umum**

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan bagi pelamar formasi jabatan

Dokter Spesialis dapat melamar dengan usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;

2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan
8. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
9. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
10. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 (Dua Koma Tujuh Puluh Lima);
11. Bersedia mengabdikan pada instansi yang dilamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
12. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan, dengan ketentuan:
  - a. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
  - b. Akreditasi program studi/perguruan tinggi ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

## B. Persyaratan Khusus

1. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan STR internship) sesuai Jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.

Kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR **sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Surat Tanda Register untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 Tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024** (terlampir pada link : <https://bit.ly/STRtenagakesehatan>)

**Kualifikasi pendidikan untuk kebutuhan jabatan kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 Tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024** (terlampir pada link: <https://bit.ly/kualifikasipendidikantenagakesehatan> )

2. Bagi penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan kebutuhan umum, wajib melampirkan:
  - a. Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya; dan
  - b. Tautan (*link*) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
3. Pelamar yang melamar pada kebutuhan umum tenaga teknis untuk jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama harus memenuhi syarat tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan;
4. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK.

### III. TATA CARA PENDAFTARAN

Pelamaran seleksi pengadaan PNS dilakukan secara daring melalui laman SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id> dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Setiap dokumen persyaratan **WAJIB DOKUMEN ASLI YANG DIPINDAI (SCAN) BERWARNA (TIDAK HITAM PUTIH) DAN TERBACA DENGAN JELAS DAN UTUH (TIDAK TERPOTONG)** kemudian diunggah pada tahap unggah dokumen di SSCASN dengan format ukuran dan format berkas sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi, yang terdiri dari:

1. Pembuatan akun pendaftaran seleksi pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL;
2. Pelamar agar cermat dan teliti dalam mengisi data pada sistem pembuatan akun pendaftaran;
3. Setelah pembuatan akun, pelamar login kembali untuk melakukan pemilihan jabatan yang dilamar dan melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran pada SSCASN;
4. Berkas pendaftaran diajukan oleh pelamar dengan mengunggah (*upload*) berkas pendaftaran di portal <https://sscasn.bkn.go.id> pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Persyaratan Wajib :
    - 1) Scan Asli Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
    - 2) Pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang merah;
    - 3) Scan asli Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
    - 4) Scan asli Transkrip Nilai sesuai ijazah yang dipakai melamar;
    - 5) Scan asli sertifikat akreditasi perguruan tinggi dalam negeri dan / atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PT Kes) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
    - 6) Dalam hal pelamar tidak memiliki sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 5, pelamar melampirkan bukti berupa :
      - a. Hasil tangkapan layar (*screen shot/capture*) pada website BAN-PT (<https://www.banpt.or.id/>) dan/atau LAM-PTKes

(<https://lamptkes.org/>) yang menunjukkan akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi pada saat kelulusan; atau

- b. Scan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi (cukup halaman depan dan halaman 30 BAB VI KETENTUAN PERALIHAN), khusus bagi lulusan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi sebelum 10 Agustus 2012; atau
  - c. Scan asli Ijasah yang didalamnya tercantum ijin akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PT Kes);
- 7) Scan Asli Surat lamaran yang sudah ditandatangani dan dibubuhkan e-meterai (format sesuai dalam **lampiran II**);
  - 8) Scan Asli Surat Pernyataan 5 (lima) Poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhkan e-meterai (format sesuai dalam **lampiran III**);
  - 9) Scan Asli Surat Pernyataan tidak pindah selama 10 tahun yang sudah ditandatangani dan dibubuhkan e-meterai (format sesuai dalam **lampiran IV**);
  - 10) Scan Asli Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Tenaga Kesehatan yang masih berlaku;
  - 11) Dokumen pelamaran wajib menggunakan meterai elektronik (E-Meterai).
  - 12) Contoh surat lamaran dan format surat pernyataan 5 poin dan surat pernyataan tidak pindah selama 10 tahun dapat didownload pada link: [https://bit.ly/formatsuratlamaran\\_pernyataan](https://bit.ly/formatsuratlamaran_pernyataan)

b. Persyaratan Khusus:

- 1). Khusus bagi penyandang disabilitas mengunggah dokumen:
  - a. Scan asli Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
  - b. Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas/tugas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar.
- 2). Link video singkat bagi pelamar disabilitas disampaikan dalam format alamat *Uniform Resource Locator* (URL) dan dapat

diakses/dibuka dan diunduh oleh panitia;

- 3). Scan asli Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang tinggi badan bagi pelamar kebutuhan umum tenaga teknis Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama; (Contoh surat keterangan tinggi badan terlampir pada Lampiran V dan dapat download pada link : <https://bit.ly/SuratKeterangantinggi> )
- 4). Khusus pelamar yang berstatus PPPK Kabupaten Klungkung yang akan melamar dalam pengadaan PNS tahun 2024 wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan mengajukan permohonan persetujuan kepada Penjabat Bupati Klungkung cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung (format sesuai dalam **lampiran VI**). Batas waktu pengajuan permohonan persetujuan paling lambat **31 Agustus 2024** di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung;  
Format surat permohonan persetujuan terlampir pada link: [https://bit.ly/permohonan\\_persetujuan](https://bit.ly/permohonan_persetujuan)
- 5). Pelamar agar membaca dengan cermat petunjuk dan keterangan yang tercantum pada menu upload dokumen.

IV. JADWAL SELEKSI

1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus - 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus - 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus - 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 - 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 - 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 - 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 - 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 - 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September - 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 - 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 - 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober - 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober - 16 November 2024

14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 - 19 November 2024
15	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 - 22 November 2024
16	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 - 25 November 2024
17	Penarikan data final SKB CPNS	26 - 28 November 2024
18	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November - 3 Desember 2024
19	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 - 8 Desember 2024
20	Pelaksanaan SKB CPNS	9 - 20 Desember 2024
21	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 - 4 Januari 2025
22	Pengumuman Hasil CPNS	5 - 12 Januari 2025
23	Masa Sanggah	13 - 15 Januari 2025
24	Jawab Sanggah	13 - 19 Januari 2025
25	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 - 20 Januari 2025
26	Pengumuman Pasca Sanggah	16 - 22 Januari 2025
27	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari - 21 Februari 2025
28	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari - 23 Maret 2025

Jadwal seleksi bersifat tentatif (dapat berubah sewaktu-waktu) sesuai perubahan jadwal dari Badan Kepegawaian Negara.

V. TAHAPAN SELEKSI

A. Seleksi Administrasi

1. Seleksi Administrasi hanya dilakukan bagi pelamar yang sudah mengakhiri pendaftaran pada SSCASN. Bagi pelamar yang belum mengakhiri pendaftaran sampai batas waktu pendaftaran, maka data pendaftaran tidak akan terekam di panitia.
2. Pada tahap seleksi administrasi, panitia akan mengecek data yang diunggah pelamar dan melakukan pencocokan dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku.
3. Hasil dari tahapan seleksi administrasi akan diumumkan setelah tahapan pendaftaran selesai.
4. Bagi pelamar yang Memenuhi Syarat (MS), dapat mengikuti tahapan selanjutnya untuk mengikuti ujian seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT).

5. Bagi pelamar yang Tidak Memenuhi Syarat, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan dapat diajukan melalui SSCASN.
6. Panitia instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan pelamar.
7. Panitia instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
8. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

#### **B. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)**

1. Dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
2. Dilaksanakan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT);
3. SKD terdiri dari tes wawasan kebangsaan, tes intelegensia umum, dan tes karakteristik pribadi.

#### **C. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)**

1. Dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan;
2. Dilaksanakan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT);
3. Jumlah peserta yang mengikuti SKB ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas yang ditentukan.

### **VI. KETENTUAN LAINNYA**

1. Pelamar yang mengikuti seleksi pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung **tidak dipungut biaya apapun (GRATIS)**;
2. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu:
  - a. PNS; atau
  - b. PPPKpada tahun anggaran yang sama  
Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;

3. Pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal pelamar diketahui:
  - a. melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan;
  - b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda;
  - c. memberikan data dan/atau keterangan yang tidak benar, baik pada tahap pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat sebagai PNS.
4. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
5. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait dengan NIK, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP Pelamar, bukan menghubungi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klungkung;
6. Panitia Seleksi Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 tidak menerima berkas fisik baik langsung maupun via kurir/Pos, pemberkasan sepenuhnya secara daring.
7. Pada saat pengisian data diri pelamar, agar dilakukan secara teliti dan telah sesuai dengan data yang dimiliki agar tidak terjadi kesalahan data yang mengakibatkan gugurnya pelamar di tahapan Seleksi Administrasi;
8. Calon pelamar hanya punya 1 (satu) kali kesempatan melakukan pendaftaran untuk periode seleksi pengadaan PNS Tahun 2024;
9. Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para pelamar, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi pengadaan PNS Pemerintah Kabupaten Klungkung, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
10. Semua Peraturan seleksi pengadaan PNS Tahun 2024 terlampir pada link : [https://bit.ly/Kumpulanperaturan\\_peraturan](https://bit.ly/Kumpulanperaturan_peraturan)
11. Semua informasi atau pengumuman terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 akan diunggah pada website <https://klungkungkab.go.id> dan laman

media sosial Facebook “BKPSDM Kabupaten Klungkung” dan IG :  
@bkpsdmklungkung

12. Pelayanan dan pengaduan terkait Seleksi Pengadaan PNS dapat menghubungi  
Call center/Help Desk Penerimaan PNS Pemerintah Kabupaten Klungkung,  
melalui:

Telp : (0366) 24459  
- hari Senin s.d. Kamis pukul 08.00 – 16.30 Wita  
- hari Jumat pukul 08.00 – 14.30 Wita  
Email : cpnsklungkung@gmail.com  
Fb page : BKPSDM Kabupaten Klungkung  
(<https://www.facebook.com/bkpsdmkabklungkung>)  
(IG : @bkpsdmklungkung)

Semarang, 19 Agustus 2024

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PNS di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Klungkung Tahun 2024,



**ANAK AGUNG GEDE LESMANA, S.T, M.T.**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP 19710102 200003 1 003

RINCIAN KEBUTUHAN KHUSUS DAN KEBUTUHAN UMUM PADA SELEKSI PENGADAAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024

KEBUTUHAN KHUSUS  
PENYANDANG DISABILITAS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
1	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S- 1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORM ASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN   SEKRETARIAT
2	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S- 1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S- 1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   SEKRETARIAT   SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; D-IV ANIMASI ; S-1 PARIWISATA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS PARIWISATA   UPTD PENGELOLAAN WISATA NUSA PENIDA   SUB BAGIAN TATA USAHA
4	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   KECAMATAN NUSA PENIDA   SEKRETARIAT   SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
5	PERENCANA AHLI PERTAMA	S- 1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KETENAGAKERJAAN   SEKRETARIAT
TOTAL			5	

KEBUTUHAN UMUM  
A. TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN	DAPAT DILAMAR DISABILITAS
1	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAWAN I	TIDAK
2	APOTEKER AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GEMA SANTI NUSA PENIDA   KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIS	TIDAK
3	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. INSTALASI FARMASI	TIDAK
4	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. INSTALASI FARMASI	TIDAK
5	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAWAN II	TIDAK
6	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NUSA PENIDA I	TIDAK
7	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BANJARANGKAN I	TIDAK
8	BIDAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAWAN II	TIDAK
9	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KLUNGKUNG I	TIDAK

10	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NUSA PENIDA III	TIDAK
11	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BANJARANGKAN II	TIDAK
12	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GEMA SANTI NUSA PENIDA   KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN	TIDAK
13	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	2	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GEMA SANTI NUSA PENIDA   KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN	TIDAK
14	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	TIDAK
15	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	TIDAK
16	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GEMA SANTI NUSA PENIDA   KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN	TIDAK
17	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	TIDAK
18	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	2	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GEMA SANTI NUSA PENIDA   KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN	TIDAK
19	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GEMA SANTI NUSA PENIDA   KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN	TIDAK

20	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GEMA SANTI NUSA PENIDA   KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN	TIDAK
21	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GEMA SANTI NUSA PENIDA   KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN	TIDAK
22	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	TIDAK
23	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GEMA SANTI NUSA PENIDA   KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN	TIDAK
24	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAWAN I	TIDAK
25	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KLUNGKUNG I	TIDAK
26	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAWAN II	TIDAK
27	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BANJARANGKAN I	TIDAK
28	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	3	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NUSA PENIDA I	TIDAK
29	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BANJARANGKAN II	TIDAK

30	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NUSA PENIDA III	TIDAK
31	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NUSA PENIDA II	TIDAK
32	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIS	TIDAK
33	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG   WAKIL DIREKTUR PENUNJANG PELAYANAN   BIDANG PENUNJANG PELAYANAN MEDIS	TIDAK
34	FISIOTERAPIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GEMA SANTI NUSA PENIDA   KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIS	TIDAK
35	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAWAN I	TIDAK
36	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAWAN II	TIDAK
37	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BANJARANGKAN II	TIDAK
38	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAWAN II	TIDAK
39	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NUSA PENIDA III	TIDAK

40	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NUSA PENIDA I	TIDAK
41	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NUSA PENIDA II	TIDAK
42	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN	TIDAK
43	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KLUNGKUNG II	TIDAK
44	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BANJARANGKAN I	TIDAK
45	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KLUNGKUNG I	TIDAK
46	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NUSA PENIDA II	TIDAK
47	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAWAN II	TIDAK
48	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NUSA PENIDA III	TIDAK
49	PERAWAT TERAMPIL	6	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN	TIDAK

50	PERAWAT TERAMPIL	4	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BANJARANGKAN II	TIDAK
51	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAWAN II	TIDAK
52	PERAWAT TERAMPIL	5	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NUSA PENIDA III	TIDAK
53	PERAWAT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BANJARANGKAN I	TIDAK
54	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GEMA SANTI NUSA PENIDA   KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIS	TIDAK
55	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAWAN II	TIDAK
56	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KLUNGKUNG II	TIDAK
57	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAWAN I	TIDAK
58	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NUSA PENIDA I	TIDAK
59	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NUSA PENIDA II	TIDAK

60	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BANJARANGKAN II	TIDAK
61	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GEMA SANTI NUSA PENIDA   KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIS	TIDAK
62	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NUSA PENIDA III	TIDAK
63	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAWAN II	TIDAK
64	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAWAN II	TIDAK
65	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NUSA PENIDA II	TIDAK
66	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	5	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GEMA SANTI NUSA PENIDA   KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIS	TIDAK
67	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GEMA SANTI NUSA PENIDA   KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIS	TIDAK
68	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BANJARANGKAN I	TIDAK
69	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KLUNGKUNG I	TIDAK

70	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAWAN I	TIDAK
71	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAWAN II	TIDAK
72	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAWAN II	TIDAK
73	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BANJARANGKAN II	TIDAK
74	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NUSA PENIDA III	TIDAK
TOTAL		109		

**B. TENAGA TEKNIS**

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN	DAPAT DILAMAR DISABILITAS
1	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; D-IV ANIMASI ; S-1 PARIWISATA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS PARIWISATA   BIDANG PEMASARAN PARIWISATA	TIDAK
2	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; D-IV ANIMASI ; S-1 PARIWISATA	3	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS PARIWISATA   UPTD PENGELOLAAN WISATA NUSA PENIDA   SUB BAGIAN TATA USAHA	TIDAK
3	ANALIS AKUAKULTUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN ; S-1 BIOLOGI ; S-1 TEKNOLOGI AKUAKULTUR; S- 1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN   BIDANG PERIKANAN	TIDAK

4	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 AKUNTANSI ; S- 1 BIOLOGI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH   KELOMPOK JF PELAKSANAAN KEBIJAKAN, KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENGENDALIAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN , PENGKAJIAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH	DAPAT
5	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S- 1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S- 1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN	DAPAT
6	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	S- 1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS ; S-1 SASTRA INGGRIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KETENAGAKERJAAN   BIDANG PELATIHAN, PRODUKTIVITAS DAN TRANSMIGRASI	TIDAK
7	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KETENAGAKERJAAN   BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	TIDAK
8	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	DAPAT
9	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	TIDAK
10	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	TIDAK
11	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   KECAMATAN BANJARANGKAN   SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	TIDAK

12	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S- 1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   KECAMATAN DAWAN   SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	TIDAK
13	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S- 1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   BIDANG PEMERINTAHAN DESA	TIDAK
14	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   KECAMATAN NUSA PENIDA   SEKSI SOSIAL BUDAYA	TIDAK
15	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S- 1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   KECAMATAN NUSA PENIDA   SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	TIDAK
16	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S- 1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAWAN II   SUB BAGIAN TATA USAHA	DAPAT
17	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	DAPAT
18	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S- 1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG , PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN   SEKRETARIAT   SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DAPAT
19	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S- 1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S- 1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN   SEKRETARIAT   SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DAPAT
20	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KLUNGKUNG II   SUB BAGIAN TATA USAHA	DAPAT

21	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   SEKRETARIAT   SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DAPAT
22	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S- 1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	DAPAT
23	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S- 1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG MUTASI, PROMOSI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR	DAPAT
24	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NUSA PENIDA I   SUB BAGIAN TATA USAHA	DAPAT
25	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S- 1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S- 1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	DAPAT
26	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S- 1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S- 1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN   SEKRETARIAT   SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DAPAT
27	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN UMUM	DAPAT
28	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   SEKRETARIAT	DAPAT
29	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S- 1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	2	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN ORGANISASI	DAPAT

30	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN   SEKSI PEMADUAN MODA DAN TEKNOLOGI PERHUBUNGAN	DAPAT
31	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NUSA PENIDA II   SUB BAGIAN TATA USAHA	DAPAT
32	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG   WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA   BAGIAN BINA PROGRAM	DAPAT
33	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KEBUDAYAAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DAPAT
34	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   SEKRETARIAT   SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DAPAT
35	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KLUNGKUNG I   SUB BAGIAN TATA USAHA	DAPAT
36	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	DAPAT
37	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	DAPAT
38	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BANJARANGKAN I   SUB BAGIAN TATA USAHA	DAPAT

39	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NUSA PENIDA III   SUB BAGIAN TATA USAHA	DAPAT
40	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS PARIWISATA   UPTD PENGELOLAAN WISATA NUSA PENIDA   SUB BAGIAN TATA USAHA	DAPAT
41	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   INSPEKTORAT DAERAH   SEKRETARIAT	DAPAT
42	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   SEKRETARIAT	DAPAT
43	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA   BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN   SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SMP	DAPAT
44	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DAPAT
45	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   KECAMATAN DAWAN   SEKRETARIAT   SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DAPAT
46	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BANJARANGKAN II   SUB BAGIAN TATA USAHA	DAPAT
47	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   SEKRETARIAT   SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	DAPAT

48	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS PERTANIAN   SEKRETARIAT   SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DAPAT
49	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   SEKRETARIAT	DAPAT
50	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DAPAT
51	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S- 1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   UPTD. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAWAN I   SUB BAGIAN TATA USAHA	DAPAT
52	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   KECAMATAN KLUNGKUNG   SEKRETARIAT   SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DAPAT
53	PENATA KEPROTOKOLAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	2	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN UMUM	TIDAK
54	PENATA KEPROTOKOLAN	S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN   SUBBAGIAN PROTOKOL	TIDAK
55	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III GIZI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	TIDAK
56	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   KECAMATAN KLUNGKUNG   SEKRETARIAT   SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	DAPAT

57	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   SEKRETARIAT   SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	DAPAT
58	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN UMUM	DAPAT
59	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   KECAMATAN BANJARANGKAN   SEKRETARIAT   SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	DAPAT
60	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	DAPAT
61	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	11	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN	TIDAK
62	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	3	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG - UNDANGAN DAERAH	TIDAK
63	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	6	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	TIDAK
64	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH   SEKRETARIAT	DAPAT
65	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KESEHATAN   SEKRETARIAT   SUBBAG KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM	DAPAT

66	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   BIDANG TELEMATIKA	DAPAT
67	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG   DINAS PARIWISATA   SEKRETARIAT	DAPAT
TOTAL			89		



Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PNS di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung  
Tahun 2024.



**ANAK AGUNG GEDE LESMANA, S.T, M.T.**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP 19710102 200003 1 003

LAMPIRAN II - CONTOH SURAT LAMARAN (Diketik oleh pelamar)

....., .....2024

Nomor : -

Lampiran : 1 (satu) gabung

Hal : Lamaran Seleksi Pegawai Negeri Sipil

Kepada:

Yth Pj. Bupati Klungkung

di-

Semarapura

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (sesuai ijasah)  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Kabupaten Tempat Lahir :  
Jenis Kelamin : (Laki-laki/Perempuan)\*\*\*  
Agama :  
Status : (Belum Kawin/Kawin/Janda/Duda)\*\*\*  
Alamat :  
Kualifikasi Pendidikan : (jenjang pendidikan beserta jurusan)  
No telp dan email aktif :

dengan ini mengajukan lamaran menjadi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 untuk formasi jabatan .....)\* dengan unit kerja penempatan di .....)\*\*

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :

1. Pasfoto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
2. Scan KTP / Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil )\*\*\*
3. Scan Ijazah asli;
4. Scan Transkrip Nilai asli;
5. Scan asli Surat Pernyataan;
6. Scan asli Surat Pernyataan Tidak Pindah Penempatan;
7. Bukti akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi;
8. Scan asli Surat Tanda Registrasi (STR); )\*\*\*\*
9. Scan asli Surat Keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat disabilitas; )\*\*\*\*\*
10. Tautan (link) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari saya dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang dilamar; )\*\*\*\*\*
11. surat keterangan tinggi badan;) \*\*\*\*\*
12. Persyaratan lain sesuai di pengumuman

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Hormat saya,

e-meterai  
10.000

(nama lengkap)

Keterangan :

)\* Isikan Nama Jabatan yang dilamar (lihat di lampiran I pengumuman pada kolom jabatan)

)\*\* Isikan Unit Kerja Penempatannya sesuai dengan unit kerja pada jabatan yang dilamar (lihat di lampiran I pengumuman pada kolom unit penempatan)

)\*\*\* pilih salah satu

)\*\*\*\* dicantumkan bagi yang memiliki, bagi yang tidak memiliki silahkan di hapus

)\*\*\*\*\* bagi pelamar penyandang disabilitas, bagi yang tidak silahkan di hapus

)\*\*\*\*\* bagi pelamar penyandang disabilitas, bagi yang tidak silahkan di hapus

)\*\*\*\*\* bagi pelamar Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat dan Tgl Lahir : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

- 1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., ..... 2024

Yang membuat pernyataan,

e-meterai  
10.000

.....

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Pendidikan/Jurusan :  
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila saya diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Klungkung, saya tidak akan mengajukan permohonan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

....., ..... 2024

Yang membuat pernyataan,

e-meterai  
10.000

.....

KOP INSTANSI KESEHATAN PEMERINTAH

SURAT KETERANGAN  
Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dokter Pemeriksa Rumah Sakit...../Puskesmas)\* ....., Kecamatan....., Kab....., Prov.....

menerangkan:

Nama : .....  
Umur : ..... Tahun  
Jenis Kelamin : Laki/Perempuan)\*  
Alamat : .....

Dari hasil pemeriksaan fisik pada tanggal .....bulan.....tahun di Rumah Sakit...../Puskesmas)\* bahwa yang bersangkutan memiliki :

Tinggi Badan : .....cm

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk keperluan melamar seleksi PNS untuk kebutuhan umum tenaga teknis jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2024.

.....  
Dokter Pemeriksa,

Nama (.....)  
NIP.....

Catatan :  
\*) pilih salah satu

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Persetujuan  
Mengikuti Seleksi PNS

Kepada :  
Yth. Pj. Bupati Klungkung  
Cq. Kepala Badan  
Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Klungkung

Bersama surat ini kami sampaikan permohonan persetujuan mengikuti seleksi PNS di instansi .....  
..... atas nama :

N a m a : .....  
N I P P P K : .....  
Golongan ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Instansi : .....

Demikian surat permohonan persetujuan ini disampaikan, untuk mendapat pertimbangan dan  
petunjuk lebih lanjut.

....., ..... 2024

Pemohon

Nama  
NI PPPK

Tembusan :  
Kepala OPD tempat kerja PPPK pemohon